

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN POKJA PAPUA PRODUKTIF

PERIODE JUNI 2026

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi
Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat

Sinkronisasi • Harmonisasi • Evaluasi • Koordinasi (SHEK)



MERAH PUTIH (KNN)
DI KABUPATEN MA
TAHUN 2



Ringkasan Eksekutif

Selama Bulan Juni 2026, Pokja Papua Produktif BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat menitikberatkan kerja pada peningkatan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi masyarakat Papua Barat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) — mendampingi dan mensosialisasikan amanat UU No. 21 Tahun 2021 Pasal 47 tentang Pengawasan Sosial serta PP No. 107 Tahun 2021 tentang Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Otonomi Khusus.

Pokja juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan strategis, berupa Rancangan Kegiatan Teknisma bersama pokja lainnya, menjelaskan kepada Pemerintah Daerah pentingnya sinergitas dengan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian (BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan, APIP, Ombudsman, DPRD/DPRK, dan Perguruan Tinggi Negeri) dalam pembinaan dan pengawasan penerimaan dana Otsus.

Output kinerja Pokja turut memberikan sumbangan pada peningkatan kualitas pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah terkait tata cara penerimaan dan penggunaan dana Otsus, termasuk melalui pendampingan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tugas & Fungsi Pokja Papua Produktif

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2022 tentang Pembentukan BP3OKP

T

TUGAS

- Mendorong semangat Otonomi Khusus melalui demokrasi berkeadilan dan tidak diskriminatif.
- Bersinergi mewujudkan Desentralisasi Asimetris sesuai kekhususan daerah.
- Melaksanakan koordinasi lintas lembaga di bidang kesejahteraan masyarakat.
- Bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda mendampingi OAP demi kesejahteraan & pemerataan ekonomi.
- Memantau dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan Otsus.
- Mendukung program kerja daerah di bidang peningkatan ekonomi masyarakat.

F

FUNGSI

- Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) dengan Kementerian/Lembaga terhadap kebijakan Otsus.
- Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta kelembagaan masyarakat dalam pembinaan & pengawasan penggunaan Dana Otsus oleh OPD.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Pimpinan BP3OKP untuk diteruskan kepada Presiden melalui Wakil Presiden.

JUNI 2026 • 6 KEGIATAN

Ringkasan Capaian Strategis SHEK

1

Perencanaan peternakan 2027 — Tersusun arah sinergi pembangunan peternakan & kesehatan hewan, dengan NTP peternakan Maret 2026 sebesar 101,61.

2

Kampung Nelayan Merah Putih — Program diresmikan tahap awal di Manokwari; berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih (target 75 outlet) dan agenda kunjungan Wapres untuk perluasan lahan cokelat (± 2.000 ha) & kelapa dalam.

3

Rehabilitasi Kebun Kakao — 2.000 ha lahan kakao dikelola (petani & koperasi) dengan skema agroforestri berkelanjutan, memperkuat Papua Barat sebagai sentra kakao nasional.

4

Pengukuhan Anggota Pokja — 18 Anggota Pokja BP3OKP baru dikukuhkan dan dibekali tugas, fungsi, serta penguatan integritas untuk mendukung fungsi SHEK.

5

Audiensi Kampung Nelayan Atuboy Mesiri — Disepakati pelaksanaan proyek melalui jalur resmi (dokumentasi, izin lingkungan, bertahap); dilaporkan pula keberhasilan Pesparawi Nasional ke-14.

6

Rapat Paripurna LHP BPK — Papua Barat meraih opini WTP atas LKPD TA 2025, dengan sejumlah rekomendasi BPK yang masih perlu dituntaskan.

Rakortek Perencanaan Pembangunan Peternakan & Kesehatan Hewan 2027

 Jumat, 05 Juni 2026

 Hotel Vitta Niu, Manokwari

HASIL KEGIATAN

Anggota Pokja Papua Produktif (Victor Towansiba, ST) menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2027 se-Provinsi Papua Barat, bertema Akselerasi Hilirisasi Pembangunan Peternakan Terpadu guna Mendukung Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Pangan. Kegiatan dibuka oleh Asisten II Sekda mewakili Gubernur Papua Barat.

CAPAIAN

Tersusunnya arah sinergi perencanaan pembangunan peternakan & kesehatan hewan 2027; teridentifikasinya fokus pengembangan pakan mandiri berbasis potensi lokal dan optimalisasi rantai pasok pakan sebagai penggerak ekonomi daerah. Nilai Tukar Petani (NTP) sub-sektor peternakan Maret 2026 tercatat 101,61, menjadi indikator capaian kesejahteraan peternak.

DOKUMENTASI



REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

Memperkuat penyediaan pakan ternak berbasis potensi lokal di tingkat kampung; mendorong hilirisasi produk peternakan dari hulu ke hilir; menyinkronkan program Dinas Peternakan dengan kebijakan Otonomi Khusus.

Peletakan Batu Pertama Kampung Nelayan Merah Putih

📅 Jumat, 19 Juni 2026

📍 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Maruni, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari

HASIL KEGIATAN

Kepala BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, SH.,M.Kn, bersama Anggota Pokja Papua Produktif menghadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden untuk membangun masyarakat dari bawah.

CAPAIAN

Program reguler Tahun 2026 diresmikan untuk tahap awal di Kabupaten Manokwari; terjalin kolaborasi dengan Koperasi Merah Putih (target 75 outlet) untuk membantu pemasaran hasil tangkapan nelayan; teragendakannya kunjungan Wakil Presiden ke Ransiki untuk penguatan ketahanan pangan melalui perluasan lahan cokelat ($\pm$ 2.000 ha) dan kelapa dalam.

DOKUMENTASI



REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

BP3OKP mengawal realisasi program Kampung Nelayan dan Koperasi Merah Putih hingga tahap operasional; koordinasi lanjutan dengan Pemda, TNI/Polri, dan Satgas Percepatan Pembangunan dari Pusat.

Kunjungan Kerja Wapres: Penanaman & Rehabilitasi Kebun Kakao

 Sabtu, 20 Juni 2026

 Kebun Kakao PT Ebier Suth Cokran, Kabupaten Manokwari Selatan

HASIL KEGIATAN

Wakil Presiden RI meninjau program rehabilitasi perkebunan kakao dan melakukan penanaman bibit kakao bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Barat, Bupati Manokwari Selatan, petani, dan mahasiswa, sebagai simbol percepatan program rehabilitasi kebun kakao Kementerian Pertanian TA 2026.

CAPAIAN

Sebanyak 2.000 hektare lahan dikelola untuk pengembangan kakao (1.800 ha oleh petani, 200 ha oleh Koperasi Ebier Suth Cokran) dengan skema agroforestri berkelanjutan (1.200 ha kebun kakao & 800 ha kawasan konservasi), menggunakan klon unggul CKR-40, CKR-13, CKR-14 dan CKR-12, memperkuat posisi Papua Barat sebagai sentra kakao nasional.

DOKUMENTASI



REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

Mengawal implementasi program rehabilitasi kakao agar tepat sasaran dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan serta kesejahteraan masyarakat adat setempat.

Kunjungan Kerja Wapres: Penanaman & Rehabilitasi Kebun Kakao

 **Senin - Rabu, 22-24 Juni 2026**

Hotel Swissbell Kota Jayapura, GKN Kota Jayapura

HASIL KEGIATAN

Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP/BP3OKP) menyelenggarakan Kegiatan Pengukuhan dan Pembekalan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Badan Pengarah Papua Hasil Rekrutmen Tahun 2026 di Jayapura, berlangsung selama 3 hari (22–24 Juni 2026). Sebanyak 18 Anggota Pokja baru dikukuhkan dan dibekali materi mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, SH., M.Kn, turut hadir sebagai saksi pengukuhan

CAPAIAN

Terkukuhkannya 18 Anggota Pokja BP3OKP hasil rekrutmen 2026 yang siap mengawal percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua; meningkatnya pemahaman anggota baru terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawab kelembagaan dalam mendukung fungsi SHEK; tersampainya arahan penguatan integritas kepada seluruh anggota baru guna mewujudkan pembangunan Papua yang lebih Sehat, Cerdas, Produktif, Damai, dan Sejahtera.

DOKUMENTASI



REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

BP3OKP Perwakilan Papua Barat perlu segera melakukan orientasi lapangan dan pendampingan awal bagi Anggota Pokja baru agar dapat langsung berintegrasi dengan program-program strategis yang sedang berjalan di daerah; menindaklanjuti hasil pembekalan dengan penyusunan rencana kerja tahunan per Pokja yang terukur dan selaras dengan RIPPP/RAPPP; serta melakukan koordinasi dengan Sekretariat Badan Pengarah Papua terkait pengisian kekosongan posisi Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Pegunungan pasca berpulangnya anggota sebelumnya, agar fungsi pengawasan Otsus di wilayah tersebut tidak terhambat.

Audiensi Kampung Nelayan Merah Putih Atuboy Mesiri

 Kamis, 25 Juni 2026

 Sekretariat BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat

HASIL KEGIATAN

Audiensi antara Kelompok Kerja Kampung Nelayan Merah Putih Atuboy Mesiri dengan BP3OKP membahas Proyek Perumahan Nelayan di Sowi 4 Pantai, Desa Atiboi Mesiri (lahan 22,5 ha, tiga tipe rumah panggung, pelestarian mangrove, dan area budidaya ikan & kepiting), menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan kepada Wakil Presiden pada 20 Juni 2026.

CAPAIAN

Disepakati bahwa proyek dilaksanakan melalui jalur resmi dengan dokumentasi lengkap, izin lingkungan, dan pendekatan bertahap. Turut dilaporkan keberhasilan penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-14 di Papua Barat yang sebelumnya sempat terkendala anggaran.

DOKUMENTASI



REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

Kelompok Kerja menyiapkan dokumen presentasi dan dokumentasi foto pertemuan; BP3OKP menerbitkan surat rekomendasi kepada Wakil Presiden dan mengirimkan paket dokumen ke Sekretariat Wapres; koordinasi lanjutan dengan Kementerian Perumahan.

Rapat Paripurna Istimewa DPRP: Penyampaian LHP BPK RI

📅 Senin, 29 Juni 2026

📍 Hotel Aston Niu, Manokwari, Provinsi Papua Barat

HASIL KEGIATAN

DPRP Papua Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan II Tahun 2026 dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Papua Barat TA 2025, dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, BPK RI, DPRD, FORKOPIMDA, serta pimpinan BUMD/BUMS/Bank.

CAPAIAN

Pemerintah Provinsi Papua Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025, meski BPK memberikan sejumlah rekomendasi yang masih harus dituntaskan.

REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

DPRP membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK; memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna mendorong peningkatan pelayanan publik, pendidikan, penurunan stunting, infrastruktur, dan konektivitas.

DOKUMENTASI



Kesimpulan & Rekomendasi Umum

- Pokja Papua Produktif konsisten menjalankan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi) dalam mengawal percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Barat.
- Program strategis pusat — Kampung Nelayan Merah Putih, rehabilitasi kebun kakao, dan Rakortek Peternakan — perlu terus dikawal hingga tahap realisasi dan pemanfaatan oleh masyarakat OAP.
- Capaian opini WTP atas LKPD 2025 dan tren perbaikan IPM perlu dijaga melalui penguatan tata kelola keuangan daerah dan tindak lanjut rekomendasi BPK secara konsisten.
- Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat perlu terus diperkuat guna memastikan setiap program pusat memberi dampak nyata bagi kesejahteraan Orang Asli Papua.

Terima Kasih

Demikian Laporan Bulanan Kegiatan Pokja Papua Produktif periode Juni 2026 disampaikan untuk diketahui, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi dan petunjuk lebih lanjut.

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)
Perwakilan Provinsi Papua Barat — Pokja Papua Produktif



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

Laporan Bulanan

Pokja Polhukam

Bulan

Juni 2026



Permasalahan

1. Perhatian dan antusiasme perempuan asli Kaimana terhadap seni menganyam, seperti pembuatan Tomang (Noken), tikar, kabila, dan kerajinan anyaman sejenis yang merupakan salah satu unsur kebudayaan universal Papua, semakin menurun. Minat perempuan muda, ibu rumah tangga, maupun generasi pemula untuk mempelajari dan melestarikan keterampilan tersebut juga terus berkurang.
2. Tomang atau noken sebagai warisan budaya memiliki nilai filosofis yang tinggi serta memberikan berbagai manfaat, antara lain nilai persatuan dan kesatuan, nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai ekologis. Namun, nilai-nilai tersebut belum disosialisasikan secara optimal kepada masyarakat sehingga belum dipahami secara luas.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota belum memiliki formula atau strategi yang optimal dalam mempromosikan kebudayaan dan pariwisata sebagai daya tarik bagi wisatawan domestik, wisatawan mancanegara, maupun investor yang berminat berinvestasi di Papua.
4. Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kaimana, yang merupakan salah satu prioritas pengarusutamaan sebagaimana diamanatkan dalam RPPPP, belum memperoleh perhatian yang optimal dari Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten Kaimana, khususnya dalam aspek pengembangan sosial budaya dan pemberdayaan perempuan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menyongsong pelaksanaan Program Pengembangan Pariwisata Rintisan Teluk Triton yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

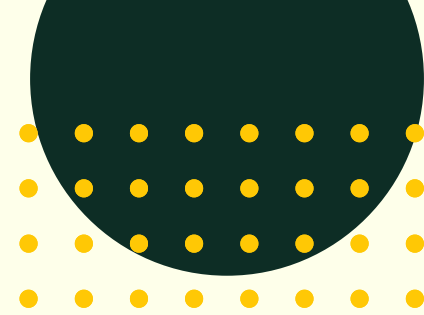
05 Juni 2026

Hotel Grand Papua Kaimana

Pelatihan Pembuatan Noken Bagi Pemula dan Ibu-ibu dari 8 suku asli Kaimana serta suku Papua lainnya

Kegiatan

1. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana dalam upaya mengedukasi masyarakat serta menata kebudayaan daerah sebagai salah satu objek dan daya tarik pariwisata.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan pembuatan Noken (Tomang). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya kaum ibu, dalam menghasilkan produk noken yang dapat dimodifikasi agar memiliki nilai tambah, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjadi sumber peningkatan pendapatan keluarga.
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Jafar Werfete, S.Sos., menyampaikan bahwa inovasi dan kreativitas dalam pembuatan noken perlu terus dikembangkan. Noken tidak hanya diproduksi dalam bentuk tradisional, tetapi juga dapat dimodifikasi sesuai perkembangan pasar tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, noken diharapkan memiliki daya tarik yang lebih tinggi serta mampu memberikan nilai ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional.



Kegiatan

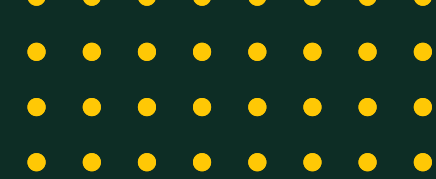
4. Staf Ahli Bupati Kaimana yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana, Drs. Usman Fenetiruma, menyampaikan bahwa pembangunan kebudayaan yang dinamis dapat diwujudkan melalui proses akulturasi budaya dan difusi kebudayaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai eksotisme produk noken yang dihasilkan oleh para perajin sehingga tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga menjadi cendera mata atau oleh-oleh khas yang diminati wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kaimana.
5. Arahkan dan Motivasi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya
Perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa noken memiliki nilai filosofis yang sangat penting sebagai simbol yang merajut entitas kultural dalam sistem sosial pada konteks lokal, regional, maupun nasional. Oleh karena itu, makna filosofis noken perlu dipahami secara mendalam, didokumentasikan, dan dikembangkan melalui penulisan ilmiah sebagai referensi untuk pelestarian budaya serta diwariskan kepada generasi mendatang.
6. Dr. Ismail Sirfefa, S.Sos., M.H. menyampaikan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dalam pemberdayaan perempuan (Papua Women Empowerment) tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya melalui anyaman Noken (Tomang), tetapi juga pada peningkatan peran dan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan keamanan. Selain itu, beliau menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui pemanfaatan bahan baku noken secara berkelanjutan agar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara inklusif.



Rekomendasi

1. Pemda provinsi dan kabupaten perlu menunjang aktivitas pelatihan pembuatan Noken atau anyaman Tomang sebagai pelestarian unsur budaya sistem kesenian secara berkelanjutan. Dalam konteks ini diperlukan dukungan pembiayaan dalam politik anggaran dalam APBD provinsi dan kabupaten guna merangsang minat dan bakat ibu-ibu terutama para pemula.
2. Dipandang perlu adanya regulasi daerah yang mengatur kewajiban pemakaian noken bagi ASN dan para pelajar pada hari-hari kerja tertentu agar berdampak positif pada pengrajin anyaman noken dalam memperoleh pendapatan dan peningkatan volume kerja home industry untuk meresap tenaga kerja.
3. Kiranya dinas kebudayaan dan pariwisata ditingkat provinsi dan kabupaten dapat berkolaborasi untuk memformulasikan sistem promosi budaya dan pariwisata daerah keluar daerah dan luar negeri agar dapat meningkatkan daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke destinasi yang berpotensi spot eksotis yang berbasis budaya lokal.
4. Perlu sinergitas RPJMD Kabupaten Kaimana dengan Provinsi Papua Barat terkait program pengembangan pariwisata rintisan di kabupaten Kaimana, terutama infrastruktur keras dan lunak tata kelola pariwisata (akomodasi, akses transportasi, dan atraksi budaya) agar dapat dinikmati wisatawan dan setelah kembalinya mungkin dapat membawa oleh-oleh belanja noken Kaimana.





Permasalahan

1. Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 H yang diperingati PHBI Kab. Kaimana yang diketuai Muhammad Kareth Werfete yang juga sebagai aktivis Muslim Papua belum maksimal karenal keterbatasan fasilitas penunjang PHBI di Daerah.
2. Belum adanya kesadaran kolektif Muslim Papua tentang Hakekat dan Tujuan Peringatan Tahun Baru Islam yang dilakukan setiap tahun sebagai refleksi perilaku ketakwaan umat Islam Kaimana, khususnya komunitas muslim papua terhadap penerapannilai ajaran Islam dalam kehidupan antar umat beragama, maupun kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

5 – 6 Juni 2026
Gedung Olahraga
Bantemen Kaimana

Persiapan Kegiatan Tabliq Akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam (1 Muharam 1448 Hijriyah)

Kegiatan

1. Penjemputan dipimpin Bupati (Drs. Hasan Achmad Aituarauw, M.Si didampingi Wakil Bupati (Isak Wariensi), Ketua DPRK (Robby Samangun, Unsur TNI dan Polri, Ketua MUI (Al Ustadz Zein Farissa, Ketua PHBI (Mohamad Kareth Werfete) dan Ketua FKUB Pdt. Surbay. Dalam penjemputan tersebut diberikan Pemakaian Kopiah Adat dari Ketua FKUB mewakili seluruh umat beragama dan menyampaikan kepada kedua Penceramah Ustadz Abdul Shomad dan Ustadz Fadlan Garamatan bahwa Kaimana selain sebagai kota senja dan kota perjuangan, Kaimana juga adalah Kota Moderasi dan Toleransi di ufuk selatan Tanah Papua.
2. Komitmen Pemuda Banser dan Ibu-ibu Muslimah dalam penjemputan sampai pelaksanaan peringatan tahun baru Islam 1 Muharam 1448 H dijadikan juga sebagai tahun perubahan sikap dan mental untuk setia membangun kerukunan keumatan demi percepatan pembangunan otonomi khusus di kabupaten Kaimana.
3. Penyampaian Hikmah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H dijadikan sebagai media refleksi, perenungan, introspeksi dan evaluasi terhadap perilaku umat Islam untuk mengukur ketakwaan kepada nilai-nilai ajaran Islam yang telah diamalkan umat Islam dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta perwujudan kehidupan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan yang kokoh untuk

Rekomendasi

1. Diharapkan agar setiap peristiwa tahun baru islam 1 Muharram setiap tahun dapat diperingati tidak hanya kepada umat islam, namun semua umat beragama untuk mengikuti ceramah tokoh agama yang terkait dengan perilaku umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Disarankan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten agar dapat menyediakan anggaran untuk menunjang event-event keagamaan termasuk peringatan tahun baru islam agar semua orang dapat memahami hakekat dan tujuan serta arti pentingnya tahun hijriah sebagai transformasi pembentukan perilaku umat beragama.



09 Juni 2026

Kabupaten Teluk Bintuni

Peringatan HUT

Kab Teluk Bintuni yang Ke-23

Permasalahan

1. Peringatan hari ulang tahun Kab Teluk Bintuni setiap tahunnya hanya berfokus pada pemberian informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang dapat terlihat pada sentra pembangunan dan ekonomi serta pemerintahan secara umum namun, jika ditelaah secara jauh masih banyak tata Kelola pemerintahan yang harus dibenahi.
2. Kompensasi hak ulayat masyarakat Teluk Bintuni di distrik Sebiar dan distrik Aroba (Suku Sumuri) masih diperhadapkan dengan sejumlah persoalan hak tanah masyarakat hukum adat dan hak hutan masyarakat yang kini menjadi tuntutan masyarakat setempat.
3. Penanganan pengungsi di distrik Moskona utara dan Moskona barat sampai saat ini belum terlaksana sebagaimana diharapkan, dan masyarakat dari kedua distrik tersebut masih mengalami kondisi traumatic yang belum didagnosis.

Kegiatan

1. Pidato bupati kab teluk Bintuni pada tanggal 9 Juni 2026 telah menyinggung tentang pentingnya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah mengenai papua sehat, cerdas dan produktif yang memerlukan penanganan secara koordinatif dari semua kementrian/Lembaga, OPD Teknis dan stakeholders sebagai mitra kerja pemerintah di daerah.
2. Pemberian bantuan bagi siswa berprestasi dan bantuan beasiswa bagi mahasiswa S1, S2, yang berkuliah di jenjang perguruan tinggi di kota study seluruh Indonesia terutama di provinsi Papua Barat.
3. Berupaya untuk meningkatkan pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi secara adil dan merata terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Rekomendasi

1. Disarankan agar pembangunan dapat menyentuh orang asli Papua, melalui program Papua sehat, cerdas, dan produktif terutama di daerah 3T agar mereka dapat merasakan hasil pembangunan dan mau terlibat sebagai pelaku atau subjek pembangunan di daerah dan kampung.
2. Disarankan agar setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum adat masyarakat untuk memanfaatkan hutan adatnya dan bereksplorasi terhadap sumberdaya alam masyarakat adat dapat memperhatikan hak-hak mereka dengan cara pemberian kompensasi berdasarkan perjanjian kerja dan kesepakatan kerja antara masyarakat pemilik hak ulayat, pemerintah daerah dan pihak perusahaan agar terjalin hubungan kerja yang komunikatif dan harmoni.
3. Disarankan agar pemerintah dapat memperhatikan hak asasi masyarakat moskona barat dan moskona utara dan tidak membiarkan mereka mengungsi meninggalkan halaman kampungnya dengan melakukan pendekatan kemanusiaan (humanity approve) agar mereka dapat melaksanakan aktivitas sebagai mana biasanya. Dan mereka yang dikorbankan dapat diberikan kompensasi sesuai dengan kebutuhan para pengungsi.



15 Juni 2026

PERMASALAHAN



1. Banyak mahasiswa OAP di kabupaten yang belum mendapat bantuan beasiswa untuk pembayaran SPP dan persiapan ujian skripsi menyebabkan kurangnya kenyamanan bagi mahasiswa di daerah (kabupaten).
2. Belum tertatanya administrasi bantuan beasiswa sehingga pendistribusian bantuan tidak merata bahkan ada daerah tertentu yang hanya menjadi perhatian pemerintah daerah provinsi Papua Barat.

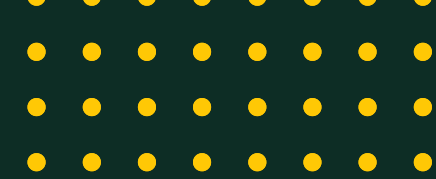
Kegiatan

1. Pokja Polhukam BP3OKP mendampingi (Ismail Sirfefa) mendampingi anggota pokja cerdas (Arius Mofu) menyerahkan proposal/permohonan bantuan beasiswa bagi mahasiswa OAP yang kuliah pada universitas papua (UNIPA-Kaimana) yang diserahkan kepada sekretaris dinas Pendidikan dan kebudayaan ibu Sudjanti Kamat, S.Sos., M.Si
2. Arahkan sekretaris dinas Pendidikan dan kebudayaan tentang mekanisme dan tata cara untuk mendapatkan bantuan beasiswa dari provinsi papua barat

Rekomendasi

1. Disarankan agar setiap bantuan bagi mahasiswa di provinsi papua barat dapat dilakukan secara adil dan merata, terutama pada kabupaten-kabupaten yang selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah provinsi papua barat.





Permasalahan

1. Peserta lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional yang diikuti dari 37 Provinsi seluruh Indonesia belum sepenuhnya menikmati akomodasi yang nyaman dan representatif karena keterbatasan penginapan yang disediakan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari belum memiliki bangunan gedung khusus terkait dengan pelaksanaan pesparawi di daerah.
3. Adanya pernyataan sikap dan permohonan para kepala kampung se- Kabupaten Manokwari Selatan tentang biaya operasional kepala kampung, peralatan kerja dan alat-alat pertanian.

19 Juni 2026

Pembukaan Pawai Pesta Paduan
Suara Gerejawi (Pesparawi)
Tingkat Nasional di Manokwari
Provinsi Papua Barat

Kegiatan

1. Jumat 19 Juni 2026, Pembukaan Pawai Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Tingkat Nasional di Manokwari Provinsi Papua Barat yang diikuti 37 Provinsi se- Indonesia adalah momentum rohani dan wahana spiritual yang mampu merajut entitas kultural suku-suku bangsa yang heterogen dalam suatu sistem sosial yang disebut sistem sosial nasional Indonesia. Energi Pesparawi juga turut mewarnai dan melebur kondisi masyarakat yang awalnya berperilaku eksklusif dan disosiatif menjadi masyarakat yang berperilaku inklusif berada dalam suasana yang asosiatif, saling menghargai dan menghormati sebagai sesama anak bangsa yang penuh toleran dan harmoni.
2. Pawai Pesparawi yang diikuti 37 provinsi di Indonesia telah berdampak positif juga terhadap transformasi sosial budaya. Dari aspek antropologis, terutama akulturasi budaya dan difusi kebudayaan dimana terjadi pembauran kebudayaan yang sangat positif dan baik serta bermanfaat bagi semua orang, secara sosiologis terjadi interaksi sosial dan komunikasi sosial yang bermuara pada faktor asosiatif yang mengeratkan persahabatan antar anak bangsa dan bukan faktor disosiatif yang menuai perpecahan yang merugikan.

Rekomendasi

1. Jagalah persatuan dan kesatuan antar umat beragama, inter umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Jadikan provinsi Papua Barat sebagai provinsi moderasi dan toleransi di Indonesia yang ditetapkan dengan regulasi (Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Barat.





Permasalahan

1. Lahan perkebunan kakao masih terbatas dan belum diperluas lahan perkebunanya serta intensifikasi dan ekstensifikasi pupuk dan peralatan kerja bagi petani masih terbatas.
2. Sistem pengeringan biji kakao masih menggunakan metode manual sehingga mempengaruhi kualitas produksi kakao menjadi bahan konsumsi dipasaran.
3. Minimnya suberdaya manusia dalam proses mekanisasi bahan baku kakao menjadi bahan konsumsi yang siap dipasarkan.



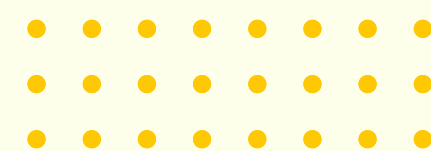
20 Juni 2026

Perkebunan Kakao Manokwari Selatan

Kunjungan Wakil Presiden RI

Kegiatan

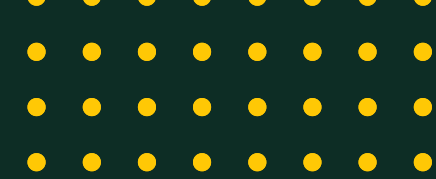
1. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi perkebunan kakao (coklat) di Ransiki Manokwari Selatan, berpartisipasi dalam penanaman 50 pohon kakao guna merangsang para petani untuk terus bekerja dan menanam untuk perbaikan ekonomi rumah tangga.
2. Melakukan pertemuan dengan para kepala kampung se-Manokwari Selatan yang didampingi Anggota BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat (ibu Irine Manibuy, SH, M.Kn), Sekda Mansel, Kepala Distrik Mansel, dan Ketua DAP Wilayah Doberay Dr. Markus Waran, ST, M.Si selaku pemilik Hak Ulayat dan Direktur Ebier Suth Cokran di ruang pertemuan industri coklat ransiki, dilanjutkan dengan dialog dan penyerahan Permohonan/Proposal Bantuan Biaya Operasional Kepala Kampung, bantuan alat-alat pertanian, alat-alat perikanan, perumahan rakyat dan lain-lain dari perwakilan kepala kampung kepada Wapres. Proposal dimaksud telah diterima Wapres dan akan dipelajari dan direspon kemudian.



Rekomendasi

1. Untuk petani kakao dan masyarakat disarankan perlu adanya proses intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pengembangan lahan kakao dan peningkatan alat produksi dari bantuan Pemda provinsi Papua Barat dan Pemda Kabupaten Manokwari Selatan agar produktivitas mendapatkan pasaran di dalam dan luar negeri.
2. Agar motivasi Wapres melalui penanaman 50 pohon kakao dapat merangsang petani dan masyarakat untuk melakukan ekspansi perkebunan baru karena perkebunan kakao yang ada sekarang ini usianya sudah lebih 40 tahun sehingga diperlukan peremajaan.
3. Dipandang perlu adanya Pendampingan dan edukasi bagi para petani kakao dan masyarakat yang punya lahan untuk dimanfaatkan dengan cara menanam tanaman produktif yang berhasil guna





Permasalahan

1. Peserta lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional yang diikuti dari 37 Provinsi seluruh Indonesia belum sepenuhnya menikmati akomodasi yang nyaman dan representatif karena keterbatasan penginapan yang disediakan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari belum bersepakat untuk berkolaborasi dalam membangun gedung pertemuan atau tempat khusus yang berskala besar untuk mengakomodir audience, tamu, para undangan dalam liven regional, nasional, dan internasional.

20 Juni 2026

Lapangan Borarsi
Manokwari Papua Barat

Pembukaan
Pesparawi Ke XIV

Kegiatan

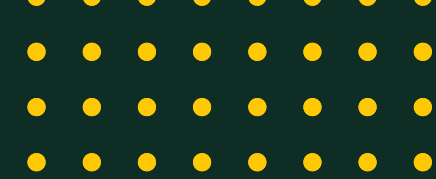
1. Sambutan Gubernur Papua Barat (Drs. Dominggus Mandacan, M.Si selaku tuan rumah : bahwa Pesparawi selain sebagai wahana puji-pujian rohani yang harmonis, tetapi juga sebagai ajang untuk mempersatukan entitas suku bangsa dari 37 provinsi se-Indonesia yang hadir di provinsi Papua Barat sekaligus sebagai Triger untuk membentuk suatu sistem sosial yang disebut sistem sosial nasional Indonesia.
2. Gubernur Papua Barat juga menghimbau melalui Pesparawi kita dapat meningkatkan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta membangun harmoni sosial, saling menghormati dan menghargai umat beragama, kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Moderasi dan Toleransi di Timur Indonesia.
3. Sambutan Singkat Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, yang dimulai dengan pengantar memberi stimulan 5 unit sepeda kepada 5 orang siswa yang juga sebagai peserta lomba. Beliau memberikan apresiasi kebanggaan atas terbangunnya Ruang Terbuka Publik (RTP), Mengharapkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Item terakhir adalah membuka dengan resmi Pesparawi Nasional XIV di RTP Manokwari.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP

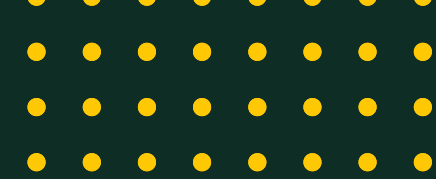
BADAN PENGARAH PAPUA



Rekomendasi

1. Persiapan Amenitas berupa hotel, motel, home stay, dan akomodasi yang dilengkapi sarana pelayanan publik diharapkan dapat didesain untuk menghadapi Iven yang sama pada masa depan.
2. Menjaga Kebersamaan, persatuan dan kesatuan sebagai kekuatan pembangunan bangsa yang beradab secara inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya





Permasalahan

1. Dari hasil wawancara anggota pokja polhukam dengan ibu-ibu UMKM yang berpartisipasi menyemarakkan Pesparawi XIV Tahun 2026 bahwa Permasalahan yang dihadapi seluruh pengurus dan anggota UMKM yang berpartisipasi dalam pelaksanaan adalah masalah Pendistribusian, Pemasaran dan keterbatasan daya beli Konsumen.
2. Hasil karya ibu-ibu Papua dalam desain batik motif Papua dan produk home industry belum sepenuhnya menjadi atensi OPD teknis provinsi dan kabupaten baik dari aspek manajemen pemasaran, pengembangan SDM melalui pelatihan, soft skill dan ethos kerja.
3. Pendistribusian produk lokal antar kabupaten dan inter kabupaten melalui transportasi laut di wilayah tanah Papua dan antar pulau belum terpikirkan oleh pengambil kebijakan di daerah (gubernur dan bupati) untuk mempermudah arus barang dan jasa UMKM yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan ekspansi rantai bisnis.

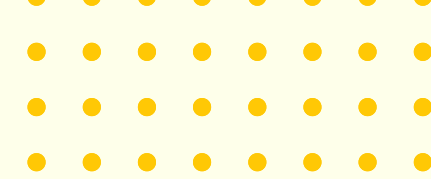
23 Juni 2026

UNIPA Manokwari

Pengamatan & Peninjauan
UMKM Pesparawi Nasional
XIV Tahun 2026

Kegiatan

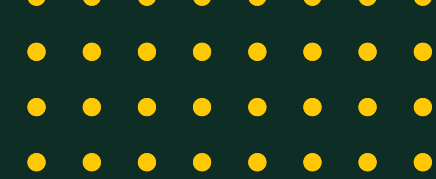
1. Diskusi strategi pendistribusian produk UMKM antar daerah dan antar pulau sebagai trigger ekspansi dan pengembangan rantai bisnis yang berimplikasi penyerapan tenaga kerja.
2. Kunjungan keliling stand UMKM dan silaturahmi serta diskusi lepas dengan ibu-ibu penjaga stand untuk mendapat data dan informasi tentang usaha-usaha UMKM dan sistem pemasaran sebagai materi yang akan disampaikan kepada pengambil kebijakan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
3. Diskusi bersama UNIPA melalui beberapa dosen yang punya peduli sekaligus sebagai pendamping dan mentor terhadap pengembangan UMKM di Provinsi Papua Barat.



Rekomendasi

1. Diperlukan kolaborasi dan koordinasi kementerian/lembaga, instansi teknis, dunia usaha, perguruan tinggi dan unsur media untuk mendorong akselerasi pembangunan kesejahteraan Papua melalui sektor ekonomi dan UMKM di daerah.
2. Diperlukan political will kepala daerah secara koordinatif untuk menghadirkan laju transportasi laut yang dapat mengantar ibu-ibu papua, bersama barang dan jasa untuk dipasarkan di mana-mana.





Permasalahan

1. Pada umumnya pemukiman bagi masyarakat nelayan belum tertata secara baik dan belum mendapatkan rumah layak huni yang representatif.
2. Terdapat tumpang tindih kebijakan pembangunan perumahan rakyat yang dilakukan kementerian/ lembaga sehingga membingungkan masyarakat, terutama masyarakat nelayan yang bermukim di pesisir pantai.
3. Dengan keterbatasan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan banyak yang belum mempunyai rumah layak huni sehingga sampai saat ini banyak yang bermukim di rumah kumuh yang tidak layak huni.

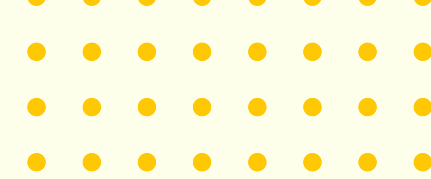
25 Juni 2026

Ruang Rapat BP3OKP , GKN Manokwari

Pertemuan dengan masyarakat nelayan Sowi 4 tentang Pembangunan Perumahan Kampung Nelayan

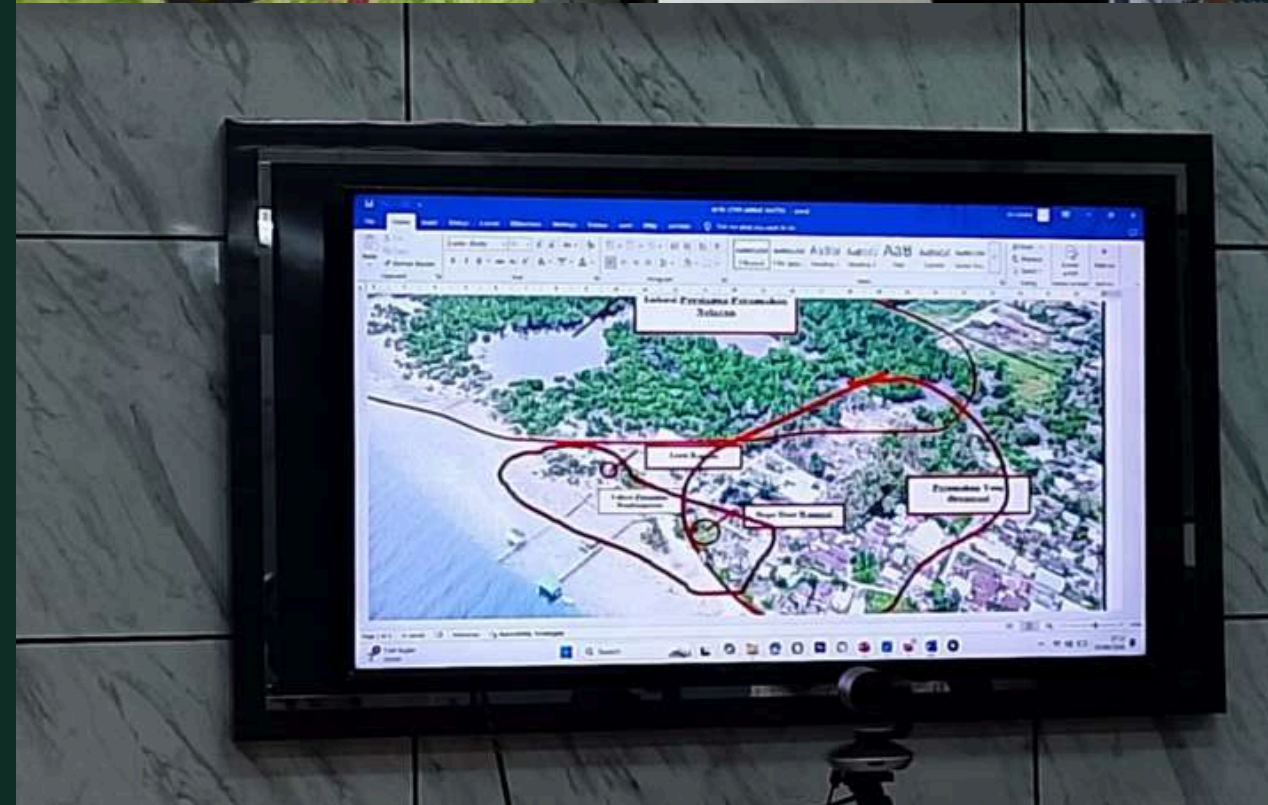
Kegiatan

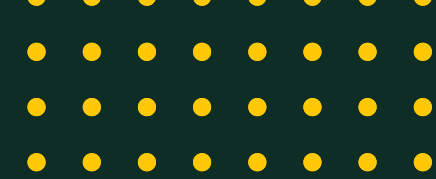
1. Presentasi dari konsultan terkait tipologi rumah (tipe 25, tipe 35, tipe 45) yang telah didesain, dan luas lokasi perumahan yang akan dibangun.
2. Presentasi dari konsultan terkait dengan rencana analisis daya dukung dan daya tampung serta kajian analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
3. Presentasi Desain tata kelola pariwisata bahari berbasis lingkungan, desain kawasan jembatan nelayan, tambatan perahu, areal sekolahan, areal masjid dan gereja serta kebutuhan lainnya yang terkait dengan pembangunan perumahan nelayan.



Rekomendasi

1. Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah teknis terkait untuk mendorong proses percepatan pembangunan pemukiman nelayan, infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan akses lainnya.
2. Diharapkan adanya kekompakan nelayan, persatuan dan kesatuan serta suara bulat untuk memperjuangkan hadirnya rumah layak huni yang representatif guna menghindari bekas rumah atau tempat kumuh yang mudah mendatangkan kerawanan sosial yang mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.





Permasalahan

1. Keterisolasian masyarakat dan generasi muda Moskona Utara dari sentra pemerintahan, pembangunan, pendidikan dan ekonomi mudah diagitasi, diprovokasi dan dihasut mengikuti kelompok2 kriminal yang tidak bertanggung jawab menyebabkan ada kelompok masyarakat dan pemuda yang ikut dalam kelompok Kombatan.
2. Banyak anak-snak berusia sekolah juga terlibat dan bergerila di hutan selama 16 tahun dan tidak menelan pendidikan secara berjenjang.
3. Kesenjangan antar sektor, wilayah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pembangunan membuat ketidakadilan sosial, dan kecemburuan sosial antar suku bangsa.

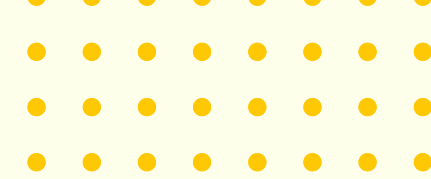
26 Juni 2026

Ruang Rapat BP3OKP , GKN Manokwari

Pertemuan dengan 30
Anggota Kombatan
TPM/OPM

Kegiatan

1. Tim Kombatan didampingi kepala distrik Moskona Utara dan satu anggota DPRD Papua Barat menjelaskan penyerahan beberapa pucuk senjata dan membuat pernyataan sikap kembali ke pangkuan NKRI dan diserahkan kepada Pangdam XVIII Kasuari.
2. Pertemuan Tim Kombatan TPM/OPM sebanyak 30 orang anggota dengan BP3OKP, melaporkan bahwa mereka akan ke dorong untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang dikawal anggota TNI dan sesudahnya akan kembali bertemu lagi dengan BP3OKP untuk menyampaikan permohonan tentang kebutuhan2 mereka yang akan diteruskan BP3OKP kepada Kementerian/Lembaga terkait di Jakarta.
3. BP3OKP akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Kodam untuk melakukan pembinaan dengan pendekatan humanity security approach dari aspek antropologi, sosiologi, religion yang lebih familiar



Rekomendasi

1. Agar semua permintaan mereka menyangkut pembangunan rumah layak huni, sekolah, puskesmas, pembentukan 3 kampung, pembentukan 1 Distrik, dan pembentukan kabupaten kiranya segera direspon pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Disarankan agar pemerintah dan pemerintah daerah terus merespon apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka terutama dalam mendorong program Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif





Permasalahan

1. Panitia belum teliti dan hikaf melihat jasa institusi yang memberikan kontribusi demi percepatan pelaksanaan Pesparawi. Semestinya ada sapaan ucapan terima kasih oleh panitia penyelenggara kepada BP3OKP yang telah berupaya membangun komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait di Jakarta.
2. Pada saat Acara Penutupan Pesparawi banyak tamu undangan bahkan duta- duta Pesparawi yang pulang karena acaranya sangat panjang dan menyita waktu saat panitia mengumumkan juara perlombaan Pesparawi nasional XIV di Ruang Terbuka Publik (RTP) Borasi Manokwari.

Kegiatan

1. Sambutan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan intinya Pesparawi Nasional XIV adalah Ajang membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Rote dan Manokwari adalah Rumah Besar Kita Bersama.
2. Sambutan Menteri Agama Prof Dr KH Nasaruddin Umar MA, Pesparawi telah sukses dan mampu merajut entitas kultural bangsa Indonesia dalam suatu sistem sosial nasional indonesia yang bermartabat, bersatu, harmoni dan toleransi demi berdiri kokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

Rekomendasi

Pesparawi Nasional XIV Tahun 2026 di Ruang Terbuka Publik (RTP) adalah kesan moral dan fondasi strategis membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diterapkan di semua Provinsi di Indonesia demi kuatnya NKRI.



Pokja Polhukam

Bulan
Juni 2026

LAPORAN BULANAN POKJA PAPUA SEHAT JUNI 2026



A RINGKASAN EKSEKUTIF

Koordinasi lintas sektor JKN, pembenahan FASYANKES, dan layanan kesehatan bergerak bagi masyarakat OAP — Juni 2026.

Koordinasi Kepesertaan JKN & Mutu FASYANKES Dalam menjalankan fungsi SHEK, BP3OKP Papua Barat Pokja Papua Sehat berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memastikan keaktifan kepesertaan JKN masyarakat OAP kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta dilakukan MoU bersama BPJS dengan pelaku usaha agar seluruh tenaga kerja terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN. BP3OKP turut menyoroti FASYANKES tingkat pertama (Puskesmas) yang belum menjalankan tugas sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk layanan rujukan (RS) yang masih membebankan biaya tambahan kepada pasien — seperti kantong darah, jasa dokter, obat, dan BMHP lainnya.

Rumah Sakit Terapung Teluk Bintuni BP3OKP Papua Barat bersama Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah mempersiapkan kapal Rumah Sakit Terapung untuk menjangkau layanan kesehatan bergerak (**Mobile Health Services**) bagi masyarakat pesisir pantai.

Rekomendasi Utama kepada Wakil Presiden BP3OKP merekomendasikan: (1) aktivasi penuh kepesertaan JKN-PBI OAP dengan tanggungan APBN melalui Kementerian Sosial; (2) pembenahan FASYANKES Puskesmas oleh Kementerian Kesehatan agar memenuhi SPM, terutama di daerah pedalaman dan terpencil; (3) dukungan logistik dan dana operasional dari Kementerian Kesehatan untuk pilot project mobile health services di Teluk Bintuni.

1 ASPEK PERENCANAAN

Sinkronisasi program pembangunan sektoral dengan RIPPP, RAPPP 2025–2029, dan kebijakan Otonomi Khusus Papua.

P.1

Rakortek Pembangunan Peternakan & Kesehatan Hewan Papua Barat TA 2027

📅 5 Juni 2026 📍 Hotel Vitta Niu, Manokwari



BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2027 se-Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat, pada 5 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan dan program pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan guna mendukung penguatan ketahanan pangan daerah. Sebagai lembaga dengan mandat percepatan pembangunan Otonomi Khusus, BP3OKP memberikan masukan strategis dan mengawal sinkronisasi program agar memberi manfaat nyata bagi Orang Asli Papua.

BP3OKP berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan dan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat Papua, memperkuat kemandirian ekonomi daerah serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di tanah Papua.

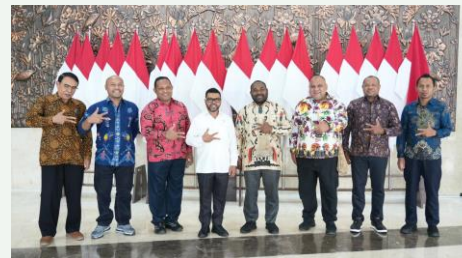
🎯 **BP3OKP:** BP3OKP mendorong: alokasi Dana Otsus ke OPD yang melakukan pembinaan ekonomi OAP (Dinas Peternakan & DKP); hilirisasi peternakan dari hulu ke hilir; pakan ternak berbasis sumber daya lokal. Sekaligus mengidentifikasi darurat perikanan Fakfak-Kaimana — ikan tangkapan masyarakat hanya laku Rp1.000/ekor akibat ketiadaan cold storage. BP3OKP mendesak DKP segera membangun cold storage di Fakfak dan Kaimana.

P.2

SHEK — Fasilitas SMK Negeri Pariwisata Kaimana ke DPD RI, Jakarta

📅 17–18 Juni 2026 📍 Kantor DPD RI, Jakarta Pusat

BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dengan menjembatani Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dalam menyerahkan Proposal Pendirian SMK Negeri 3 Pariwisata Triton kepada DPD RI di Jakarta Pusat, pada 17–18 Juni 2026.



Pertemuan ini membahas usulan pendirian SMK Negeri Pariwisata, program revitalisasi sekolah, serta pengembangan potensi pariwisata daerah melalui pendidikan vokasi. Senator Filep menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pariwisata.

🎯 **BP3OKP:** BP3OKP membuktikan peran SHEK sebagai jembatan kelembagaan: Pemda Kaimana tidak dapat mengakses DPD RI secara langsung tanpa fasilitasi. Melalui kegiatan ini, BP3OKP memastikan aspirasi daerah mendapatkan saluran formal hingga tingkat nasional.

✅ **Capaian:** Proposal SMK Negeri Pariwisata Triton Kaimana resmi diserahkan ke DPD RI; Senator Filep berkomitmen memperjuangkan ke Kemendikbud & Kemenpar; revitalisasi sekolah Kaimana masuk agenda prioritas.

1 ASPEK PERENCANAAN

Monitoring kinerja pembangunan daerah dan sinkronisasi kebijakan legislatif dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.

P.3

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 — Regional Papua

📅 22 Juni 2026 📍 Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura



Ketua BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, S.H., M.Kn., menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Papua yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, pada 22 Juni 2026.

Kegiatan ini dipimpin Menteri Dalam Negeri, sebagai wadah menampilkan inovasi dan keberhasilan kepala daerah. Penilaian mencakup empat kategori: Penanggulangan Kemiskinan & Penurunan Stunting, Entrepreneur Government/Creative Financing, Penurunan Pengangguran, dan Pengendalian Inflasi.

🎯 **BP3OKP:** Kehadiran BP3OKP dalam forum evaluasi nasional ini merupakan wujud fungsi SHEK — data kinerja pemda Papua dalam 4 kategori menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan BP3OKP. Daerah berprestasi akan diadvokasikan sebagai model replikasi untuk kabupaten lain di Papua Barat.

✅ **Capaian:** Kabupaten Fakfak menduduki posisi teratas pada kategori Pengendalian Inflasi menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dan terbaik ke II Kabupaten Manokwari adalah pemerintah daerah berprestasi Kategori Creative Financing di tingkat ibu kota provinsi.

P.4

Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan II DPRP Papua Barat Tahun 2026

📅 29 Juni 2026 📍 Hotel Aston Niu, Manokwari



Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, S.H., M.Kn., menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan II Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diselenggarakan di Hotel Aston Niu, Manokwari, pada 29 Juni 2026.

Kehadiran BP3OKP dalam forum legislatif ini merupakan wujud sinergi kelembagaan antara Badan Pengarah dan DPRP dalam memastikan agenda dan kebijakan legislatif daerah berjalan selaras dengan arah percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua sesuai RPPPP 2022–2041 dan RAPPP 2025–2029.

🎯 **BP3OKP:** Kehadiran aktif BP3OKP dalam Paripurna Istimewa DPRP menegaskan peran lembaga sebagai mitra koordinatif legislatif.

1 ASPEK PERENCANAAN



P.3

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 — Regional Papua

22 Juni 2026 Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura

2 ASPEK PENGANGGARAN

Penguatan tata kelola dana JKN dan akselerasi pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Papua Barat.

A.1 Forum Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Papua Barat dan Penandatanganan PKS SPPGSe Papua Barat bersama BPJS Kesehatan

 3 Juni 2026  Ruang Rapat Lt. III Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari

POKJA Papua sehat dalam rangka menghadiri rapa Forum Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Papua Barat dan Penandatanganan PKS SPPG Se Papua Barat bersama BPJS Kesehatan 3 juni 2026. Perwakilan bpjs provinsi papua barat, bp3okp papua barat deputi dan asisten 1 papua barat. Di ruang rapat lantai III, kantor gubernur papua barat Muga romanus menekan dari sisi pelayanan cukup memprihatinkan, karena kalau kejar pesertaan namun pelayanan tidak seimbang maka akan terjadi kekosongan oleh sebab itu harus di genjot bersama, pelayanan kesehatan harus di perhatikan tidak hanya kepesertaan bpjs. Kualitas pelayanan juga harus di perhatikan. Penerima pelayanan dan penyedia pelayanan harus ditingkatkan. Daerah pedalaman hampir tidak ada tenaga medis hanya ada pelayanan Uhc tidak hanya angka dan cakupan namun kesediaan akses pelayanan yang juga menjadi keberhasilan papua sehat seperti nakes harus tersedia

Arahan dokter feliks duwit,

1. Berkaitan dengan tugas dan peran bp3okp terkait kepentingan oap, kebijakan otsus di jilid 2, hadirnya bp3okp di papua barat untuk mengawal kebijakan otsus papua sehat, cerdas dan produktif.
2. Terkait mencapai indikator papua sehat, kami melihat berat untuk mencapai papua sehat yg mengacu pada RIPPP dan RAPP, tentu! semua stake holder harus berbenah baik pemerintah maupun k/l yang lain harus bekerja sama .
3. Tugas bpjs adalah utuk bagaimana semua masyarakat masuk dalam sistem jaminan kesehatan nasional
4. bp3okp menekan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penerima layanan dan pemberi layanan. Bagaimana masyarakat menerima fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Mari menginventaris sejauh mana masyarakat menerima faskes mulai dari tingkat pelayanan dasar hingga fasilitas pelayanan lanjut.
6. Kalau dalam indikator papua sehat sarasannya adalah OAP, oleh sebab itu kami menekan semua OAP harus clear dan jadi peserta PBI.
7. dari dukapil harus sinkron data oap dengan bpjs yang menerima pbi, jangan ada oap yang belum terdaftar pbi atau di non aktifkan

2 ASPEK PENGANGGARAN



A.1 Forum Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Papua Barat dan Penandatanganan PKS SPPGSe Papua Barat bersama BPJS Kesehatan

3 Juni 2026 ♀ Ruang Rapat Lt. III Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari

3 ASPEK PELAKSANAAN

Keterlibatan langsung BP3OKP dalam mendampingi program prioritas nasional dan kebijakan Otonomi Khusus di lapangan.

L.1

Pelatihan Pembuatan Noken — Merawat Warisan, Memperkuat Identitas Papua

📅 3–5 Juni 2026 📍 Kaimana, Papua Barat

BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat turut hadir dan memberikan arahan dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Pembuatan Noken yang diselenggarakan di Kaimana pada 3–5 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari Pokja Papua Produktif sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui penguatan keterampilan pembuatan noken yang berlandaskan nilai-nilai luhur Papua.



Melalui pelatihan ini, diharapkan generasi muda dan para pengrajin dapat terus menjaga, mengembangkan, serta mewariskan tradisi pembuatan noken sebagai bagian penting dari jati diri Orang Asli Papua.

🗨️ **BP3OKP:** BP3OKP menegaskan: pelestarian noken bukan hanya merawat warisan masa lalu — tetapi membangun masa depan yang berakar pada nilai, identitas, dan kebanggaan Papua. BP3OKP mendorong noken dikembangkan sebagai produk ekonomi kreatif OAP yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata dan platform ekspor nasional.

✅ **Capaian:** Generasi pengrajin noken Kaimana diperkuat; noken dikukuhkan sebagai komoditas ekonomi kreatif OAP bernilai budaya dan ekonomi; komitmen advokasi ke Kemenparekraf ditetapkan.

L.2

Kunjungan Kerja HUT Teluk Bintuni ke-23 & Peninjauan Kapal RS Terapung

📅 9–10 Juni 2026 📍 Gelanggang Argosigemerai, SP-5 Distrik Bintuni Timur



BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 di Gelanggang Argosigemerai, SP-5 Distrik Bintuni Timur, pada 9 Juni 2026. Bupati menyampaikan capaian pembangunan daerah, antara lain kemiskinan ekstrem turun signifikan sebesar 5,86 poin dari 18,07% menjadi 12,21%, IPM naik 0,53 poin, serta 152 Posyandu dan 56 Pustu yang tersebar di 24 distrik.

Pada keesokan harinya, 10 Juni 2026, BP3OKP meninjau kesiapan Kapal Rumah Sakit Terapung 'Bintuni Sehat' dalam rangka persiapan kunjungan Wakil Presiden RI ke Kabupaten Teluk Bintuni.

🗨️ **BP3OKP:** BP3OKP meninjau langsung Kapal RS Terapung 'Bintuni Sehat' — ini adalah realisasi konkret strategi Floating Hospital yang diadvokasikan BP3OKP. Capaian Bintuni (kemiskinan ekstrem turun 5,86 poin) menjadi bukti nyata bahwa pendekatan terpadu Dana Otsus dan program nasional dapat menggerakkan perubahan signifikan.

✅ **Capaian:** Teluk Bintuni menjadi model penurunan kemiskinan ekstrem Papua Barat.

3 ASPEK PELAKSANAAN



L.2 Peninjauan Kapal RS Terapung

📅 9–10 Juni 2026 📍 Pelabuhan Kabupaten teluk Bintuni

3 ASPEK PELAKSANAAN

Keterlibatan langsung BP3OKP dalam mendampingi program prioritas nasional dan kebijakan Otonomi Khusus di lapangan.

L.3

Rapat Koordinasi Nasional Eliminasi Malaria — Papua Pusat Krisis Malaria Indonesia

📅 12 Juni 2026 📍 Daring via Zoom (Nasional)

Pokja Papua Sehat BP3OKP Perwakilan Papua Barat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Eliminasi Malaria yang diselenggarakan secara daring pada 12 Juni 2026. Forum ini mendiskusikan strategi dan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan eliminasi malaria, di mana Indonesia mencatat 706.297 kasus malaria pada tahun 2025 dengan lebih dari 95% kasus berasal dari Tanah Papua.

Angka ini mencerminkan besarnya tantangan dan perlunya pendekatan yang lebih terkoordinasi, terpadu, serta berkomitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan eliminasi malaria di Tanah Papua.

🎯 **BP3OKP:** BP3OKP menghadiri Rakor ini sebagai wujud komitmen terhadap Program Wajib Eliminasi ATM-K yang dicanangkan dalam konsep 'Satu Sistem Kesehatan Papua Barat'. Data 95% kasus dari Papua menjadi amunisi advokasi BP3OKP untuk memastikan alokasi anggaran malaria yang proporsional dalam Dana Otsus bidang kesehatan.

L.4

Peletakan Batu Pertama Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Reguler — Maruni

📅 19 Juni 2026 📍 Lokasi KNMP Maruni, Manokwari



Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, S.H., M.Kn., bersama Pokja BP3OKP menghadiri Peletakan Batu Pertama Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Reguler Tahun 2026 di Kabupaten Manokwari, pada 19 Juni 2026. Program ini merupakan salah satu program besar yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden RI untuk membangun masyarakat dari bawah. Proyek KNMP berdiri di atas lahan seluas 22,5 hektar yang disumbangkan oleh keluarga besar Mansim Morai. Pembangunan ini terintegrasi dengan program Koperasi Merah Putih (target 75 outlet di Manokwari, peresmian Agustus 2026) untuk membantu pemasaran hasil produksi dan tangkapan nelayan OAP.

Melalui kampung nelayan merah putih, pemerintah menghadirkan pembangunan sarana, prasarana dan ekosistem usaha perikanan yang lebih baik.

🎯 **BP3OKP:** Irene Manibuy menegaskan 4 program yang dikawal BP3OKP: KNMP, Koperasi Merah Putih (75 outlet), ketahanan pangan cokelat (2.000 ha Ransiki) & kelapa dalam, serta sinkronisasi program pusat di daerah. BP3OKP berperan sebagai penjamin agar program Presiden di Papua Barat tidak berhenti di seremoni.

3 ASPEK PELAKSANAAN

FORUM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA
12 MEI 2026, TIMIKA



L.4

Peletakan Batu Pertama Kampung
Nelayan Merah Putih (KNMP) Reguler —
Maruni



19 Juni 2026



Lokasi KNMP Maruni

3 ASPEK PELAKSANAAN

Keterlibatan langsung BP3OKP dalam mendampingi program prioritas nasional dan kebijakan Otonomi Khusus di lapangan.

L.5 Pembukaan PESPARAWI XIV Nasional 2026 di Manokwari

📅 20 Juni 2026 📍 RTP Borarsi, Jl. Bandung No. 8, Kec. Manokwari Barat



Ketua BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, S.H., M.Kn., bersama Pokja BP3OKP turut menghadiri Upacara Pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV Tahun 2026 yang diselenggarakan di RTP Borarsi, Manokwari, pada 20 Juni 2026. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sambutannya, Wapres menegaskan bahwa pembangunan nasional kini tidak lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris, dan pembangunan Papua menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah. Wapres mengapresiasi tema PESPARAWI XIV yang mengangkat perdamaian dan persaudaraan di Tanah Papua.

📌 **BP3OKP:** BP3OKP mendampingi Wapres Gibran selama pembukaan PESPARAWI — momen strategis yang dimanfaatkan untuk melaporkan progres program Otsus Papua Barat secara langsung. BP3OKP juga memastikan bahwa Lapangan Borarsi yang telah selesai dibangun menjadi legacy infrastruktur yang berguna jangka panjang bagi masyarakat Papua Barat.

✅ **Capaian:** Papua Barat sukses menyelenggarakan PESPARAWI XIV dengan kehadiran Wapres;

L.6 Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor — Gerakan Ayo ke Posyandu & Ayo Imunisasi

📅 23 Juni 2026 📍 Hotel Swissbell, Manokwari



Pokja Papua Sehat BP3OKP Perwakilan Papua Barat menghadiri kegiatan Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor sekaligus Pencanangan Gerakan Ayo ke Posyandu dan Ayo Imunisasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di Hotel Swissbell Manokwari, pada 23 Juni 2026.

Kegiatan dirangkaikan dengan Anugerah Imunisasi Tahun 2026, peluncuran aplikasi digital 'Ayo ke Posyandu', dan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor. Turut hadir TP Posyandu Papua Barat, pimpinan UNICEF Papua, serta berbagai pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini, Posyandu resmi bertransformasi menjadi pusat layanan terpadu yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

📌 **BP3OKP:** BP3OKP mendukung transformasi Posyandu ini sebagai realisasi konsep 'Puskesmas dan Posyandu sebagai Pusat Komando Kesehatan Kampung' yang diadvokasikan sejak Mei 2026. Kehadiran UNICEF dan komitmen lintas sektor memperkuat sinergi untuk imunisasi, KIA, dan layanan kesehatan hingga kampung terpencil.

✅ **Capaian:** Aplikasi 'Ayo ke Posyandu' diluncurkan; komitmen lintas sektor ditandatangani; Anugerah Imunisasi 2026 diberikan; Posyandu bertransformasi menjadi pusat layanan terpadu 6 SPM.

3 ASPEK PELAKSANAAN

Kunjungan Wapres RI ke perkebunan kakao dan Pabrik Cokelat Mansel, Kabupaten Manokwari Selatan.

L.5

Wapres RI Tanam Bibit Kakao & Tinjau Pabrik Cokelat Mansel — Manokwari Selatan

📅 19 Juni 2026 📍 Perkebunan Kakao PT Ebier Suth Cokran, Kab. Manokwari Selatan



Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, selaku Ketua BP3OKP RI, melakukan kunjungan kerja ke Perkebunan Kakao PT Ebier Suth Cokran di Kabupaten Manokwari Selatan pada 19 Juni 2026. Wapres didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, serta kelompok tani yang bekerja di perkebunan tersebut.

Kunjungan diawali dengan peninjauan Pabrik Cokelat Mansel yang berada dalam kompleks perkebunan seluas 2.000 hektar. Wapres menyaksikan langsung tahapan produksi coklat dari biji kakao hingga produk jadi siap jual dan ekspor ke luar negeri. Wapres juga menerima penjelasan program rehabilitasi perkebunan kakao yang dikelola PT Ebier Suth Cokran, milik Koperasi Ebier Suth Cokran, yang mayoritas mempekerjakan Orang Asli Papua.

🔍 **BP3OKP:** Kunjungan Wapres selaku Ketua BP3OKP RI ini mengonfirmasi secara langsung bahwa program pengembangan kakao Papua Barat telah memiliki ekosistem industri yang nyata — dari kebun 2.000 ha, pabrik produksi, hingga ekspor ke luar negeri. BP3OKP menjadikan momen ini sebagai momentum mendorong: replika koperasi kakao OAP di kabupaten lain, cold storage, dan akses pasar ekspor yang lebih luas.

✅ **Capaian:** rehabilitasi 2.000 ha perkebunan kakao mendapat komitmen dukungan nasional.



3 ASPEK PELAKSANAAN

Penutupan PESPARAWI XIV Nasional 2026 dan catatan makna strategis kegiatan pelaksanaan Juni 2026.

L.8 Penutupan PESPARAWI XIV Nasional 2026 di Manokwari

 28 Juni 2026  RTP Borarsi, Jl. Bandung No. 8, Kec. Manokwari Barat

Ketua BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, S.H., M.Kn., bersama Pokja BP3OKP turut menghadiri Upacara Penutupan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV Tahun 2026 yang diselenggarakan di RTP Borarsi, Manokwari, pada Jumat, 28 Juni 2026.

Kehadiran ini merupakan wujud dukungan penuh BP3OKP terhadap terselenggaranya ajang nasional yang tidak hanya menjadi wadah pengembangan seni paduan suara gerejawi, tetapi juga mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan harmoni dalam keberagaman di Tanah Papua. Semangat kebersamaan yang terbangun melalui PESPARAWI Nasional XIV diharapkan terus menjadi inspirasi untuk menjaga persatuan dan memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat.

 **BP3OKP:** PESPARAWI XIV adalah legacy nasional terbesar di Manokwari pada 2026. BP3OKP mengawal event ini dari ancaman gagal akibat pemblokiran anggaran Kementerian Agama hingga sukses terlaksana penuh — membuktikan bahwa Papua Barat mampu menjadi tuan rumah event nasional bergengsi.

 **Capaian:** PESPARAWI XIV Nasional sukses diselenggarakan; Papua Barat dikukuhkan sebagai tuan rumah event nasional; Lapangan Borarsi menjadi infrastruktur warisan permanen bagi masyarakat Papua Barat.

Makna Strategis Aspek Pelaksanaan Juni 2026

Juni 2026 memperlihatkan BP3OKP hadir di setiap titik strategis: Kapal RS Terapung Bintuni (Floating Hospital nyata), Pelatihan Noken (ekonomi kreatif OAP), KNMP (program nelayan Presiden), kunjungan Wapres ke Pabrik Cokelat Mansel (kakao OAP menuju pasar ekspor), PESPARAWI XIV Nasional, dan Gerakan Posyandu (imunisasi hingga kampung terpencil).

4 ASPEK PENATAUSAHAAN (TATA KELOLA)

Penguatan kelembagaan BP3OKP, tindak lanjut program, dan penanganan aspirasi masyarakat Papua Barat.

T.1 Penguatan & Pembekalan 18 Anggota POKJA BP3OKP Hasil Rekrutmen Tahun 2026

📅 22–24 Juni 2026 📍 Hotel Swissbell & GKN, Kota Jayapura

Dalam rangka memperkuat percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, telah dilaksanakan Penguatan dan Pembekalan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Badan Pengarah Papua Hasil Rekrutmen Tahun 2026 di Kota Jayapura, pada 22–24 Juni 2026. Sebanyak 18 Anggota Pokja baru memperoleh pembekalan mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna mewujudkan pembangunan Papua yang lebih sehat, cerdas, produktif, damai, dan sejahtera.

Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, S.H., M.Kn., turut hadir menyaksikan penguatan sekaligus memberikan arahan kepada seluruh anggota Pokja yang baru. Kegiatan ini juga merupakan momen penghormatan kepada Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Pegunungan yang baru saja berpulang, di mana Ibu Irene turut mewakili dalam kapasitas resmi.



🎯 **BP3OKP:** Irene Manibuy memberikan arahan tegas kepada 18 POKJA baru: 'Bekerja dengan integritas penuh dan berdampak nyata bagi Orang Asli Papua.' Momen berkahang atas anggota BP3OKP Papua Pegunungan yang wafat menunjukkan bahwa BP3OKP adalah satu keluarga kelembagaan yang saling menghormati. Rekrutmen ini memperkuat kapasitas kelembagaan BP3OKP se-Tanah Papua untuk 4–5 tahun ke depan.

✅ **Capaian:** 18 Anggota POKJA baru resmi dikukuhkan dan mendapat pembekalan SHEK

4 ASPEK PENATAUSAHAAN (TATA KELOLA)

Penyelesaian aspirasi masyarakat dan penanganan krisis kemanusiaan melalui koordinasi resmi BP3OKP.

T.2 Audiensi Tim Kerja KNMP Atiboi Mesiri — Fasilitas Perumahan Nelayan

📅 25 Juni 2026 📍 Ruang Rapat BPP, GKN Lt. III, Manokwari



BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menerima audiensi Tim Kerja Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Atiboi Mesiri di Ruang Rapat BPP, Gedung Keuangan Negara Lantai III, Manokwari, pada 25 Juni 2026. Pertemuan ini mendiskusikan proyek perumahan nelayan di Sowi 4 Pantai, Desa Atiboi Mesiri, di atas lahan 22,5 hektar yang disumbangkan keluarga besar Mansim Morai — meliputi tiga tipe rumah panggung (Tipe 36, 45, 60), kawasan mangrove, dan area budidaya ikan & kepiting.

Pertemuan juga membahas laporan keberhasilan PESPARAWI XIV dan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden RI saat kunjungan ke Manokwari Selatan.

🎯 **BP3OKP:** BP3OKP berkomitmen memberikan rekomendasi ke sekretariat Wakil Presiden RI; koordinasi Menteri Perumahan; serta koordinasi KKP untuk fasilitas dermaga dan nelayan. BP3OKP menegaskan: proyek harus melalui jalur resmi dengan AMDAL, izin lingkungan, dan pembangunan bertahap.

✅ **Capaian:** Surat rekomendasi BP3OKP ke Wapres diterbitkan; dokumen proyek dikirim ke Sekretariat Wapres; koordinasi Menteri Perumahan & KKP dimulai; mekanisme komunikasi rutin KNMP–BP3OKP–Set Wapres ditetapkan.

T.3 Audiensi Bersejarah — Masyarakat Moskona Barat Eks-KKB Menyerahkan Aspirasi

📅 26 Juni 2026 📍 Ruang Rapat BPP, GKN Lt. III, Manokwari

Ketua BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, S.H., M.Kn., bersama Pokja BP3OKP menerima kunjungan dan aspirasi Masyarakat Adat Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, di Ruang Rapat BPP, Gedung Keuangan Negara Lantai III, Manokwari, pada 26 Juni 2026.

Perwakilan eks-Organisasi Papua Merdeka (OPM)/Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sektor OFIR Wilayah Moskona menyampaikan bahwa selama enam tahun mereka terpaksa mengasingkan diri di hutan akibat pengabaian sistematis oleh pemerintah dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Sebanyak 37 eks-Organisasi Papua Merdeka (OPM)/Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sektor OFIR Wilayah Moskona dari Distrik Moskona Barat telah kembali dan menyerahkan aspirasi resmi yang didokumentasikan dan ditandatangani bersama.

🎯 **BP3OKP:** 1. BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat akan meneruskan dokumen aspirasi resmi kepada instansi pemerintah terkait untuk ditindaklanjuti. 2. Menindaklanjuti aspirasi jalan Bintuni–Maybrat–Tambrau–Moskona ke kementerian terkait. 3. Mempercepat penetapan status definitif tiga desa (Meyah, Inokera, dan lainnya) di Kecamatan Moskona Barat yang masih berstatus desa persiapan. 4. Berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Bintuni untuk menindaklanjuti hasil dialog ini dan menjadwalkan pertemuan resmi dengan Masyarakat yang kembali. 5. Mengkoordinasi terkait pembangunan gedung sekolah di Desa Meyah yang terbelengkalai dan memenuhi kebutuhan guru untuk wilayah Moskona. 6. Menyediakan fasilitas kesehatan dasar, tenaga medis, dan perlengkapan medis untuk Masyarakat Moskona Barat. 7. Pembangunan Rumah Layak huni dan lapangan pekerjaan. 8. Anggota dewan melakukan pemantauan berkelanjutan atas komitmen yang telah dibuat untuk memastikan tindak lanjut nyata

✅ **Capaian:** 37 orang mantan anggota KOWIPI Batalyon OFIR dan Batalyon Sair Kodap IV Sorong Raya mengikrarkan setia kepada NKRI;

4 ASPEK PENATAUSAHAAN (TATA KELOLA)



T.3 Audiensi Masyarakat Moskona Barat Eks-KKB Menyerahkan Aspirasi

📅 26 Juni 2026 📍 Ruang Rapat BPP, GKN Lt. III, Manokwari



Kelompok Kerja (Pokja)

Papua Sehat

Kelompok Kerja Papua Sehat — BP3OKP Papua Barat

Sasaran Misi: "Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk Papua Barat"

B CAPAIAN STRATEGIS BULAN JUNI 2026

Empat capaian utama tata kelola JKN dan penguatan layanan kesehatan Papua Barat.

- 1 Alokasi Anggaran Daerah Rp50 Miliar** Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan dana Rp50 miliar untuk jaminan layanan kesehatan OAP di RS dan rujukan luar provinsi, memperkuat layanan di luar tanggungan JKN-BPJS.
- 2 Kapal Rumah Sakit Terapung Teluk Bintuni** Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah menyiapkan 1 (satu) unit kapal untuk fungsi layanan mobile health services guna menjangkau masyarakat pesisir pantai.
- 3 MoU BPJS dengan Asosiasi Pelaku Usaha** MoU antara BPJS Papua Barat dengan asosiasi pelaku usaha mewajibkan setiap tenaga kerja terregistrasi dan aktif sebagai peserta JKN.
- 4 Monitoring Layanan oleh Dinas Kesehatan Provinsi** Dinas Kesehatan Provinsi memonitor dan mengawasi pelaksanaan layanan kesehatan agar tidak ada biaya tambahan dibebankan kepada pasien; biaya di luar tanggungan JKN menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

C ISU KRUSIAL DAN HAMBATAN DI LAPANGAN

(debottlenecking) — enam hambatan utama pencapaian indikator Papua Sehat.

1

Belum ada Roadmap Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten belum memiliki roadmap kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pencapaian indikator Papua Sehat.

2

Akses Layanan Rendah Akses layanan kesehatan masyarakat OAP masih sangat rendah.

3

FASYANKES Dasar Belum SPM Kampung/distrik konsentrasi OAP belum mendapat akses layanan karena FASYANKES Dasar (Puskesmas) belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

4

Akses Rujukan Terbatas Akses OAP ke FASYANKES tingkat lanjut (RS) masih sangat terbatas akibat kendala geografis dan transportasi.

5

Validitas Data Rendah Validitas data status kesehatan masyarakat dan data infrastruktur sumber daya kesehatan masih sangat rendah.

6

Koordinasi Lemah Koordinasi internal maupun eksternal dinas kesehatan provinsi dan kabupaten hingga tingkat FASYANKES dasar dan rujukan masih rendah.

D REKOMENDASI DAN PERMOHONAN ARAHAN

(matters for decision) — enam permohonan arahan kepada Gubernur dan para Bupati.

1

Susun RENSTRA & Roadmap Gubernur dan para Bupati mengarahkan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten segera membuat RENSTRA dengan roadmap pencapaian indikator-indikator Papua Sehat.

2

Kaji Akses FASYANKES Gubernur dan para Bupati mengarahkan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten segera mengkaji rendahnya akses OAP dalam memanfaatkan FASYANKES yang tersedia.

3

Benahi Infrastruktur Puskesmas Gubernur dan para Bupati memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten melakukan pembenahan infrastruktur FASYANKES Puskesmas agar memenuhi SPM.

4

Bangun Sistem Rujukan Terintegrasi Gubernur dan para Bupati mengarahkan pembangunan sistem rujukan terintegrasi dari FASYANKES dasar hingga rujukan agar proses layanan lebih mudah.

5

Kelola Data Kesehatan yang Valid Gubernur dan para Bupati mengarahkan pengelolaan data status kesehatan masyarakat dan data infrastruktur sumber daya kesehatan yang validitasnya baik.

6

Perkuat Koordinasi Internal-Eksternal Gubernur dan para Bupati mengarahkan koordinasi internal dan eksternal agar kebijakan, strategi, program, dan kegiatan terlaksana terintegrasi mencapai sasaran Papua Sehat OAP.



TERIMA KASIH

Kelompok Kerja Papua Sehat — BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat

POKJA Papua Cerdas

LAPORAN BULANAN

JUNI 2026

Sekretariat BADAN PENGARAH PA



| 2025



CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS – PAPUA BARAT, 2026

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,21**

Baseline (2025): 13,21

Target (2029) : 13.54 – 14,55

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **8,07**

Baseline (2025): 8,07

Target (2029) : : 11.13 – 11,15

Sumber Data: RAPPP & BPS, 2026

KEGIATAN STRATEGIS-1

Dokumentasi Kegiatan Strategis #1



Photo: Kunjungan Kerja POKJA Papua Cerdas ke Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Kaimana

Mitra Strategis:

- Inspektorat Daerah Bappedalitbang Kaimana
- BPKAD Kaimana

Kaimana, 3 Juni 2026, POKJA Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana. Tujuan identifikasi permasalahan dan kendala implementasi interoperabilitas. Fungsi SHEK yang dilaksanakan POKJA Papua Cerdas yaitu koordinasi dan evaluasi pelaksanaan sistem interoperabilitas perencanaan dan penganggaran. Temuan lapangan hasil koordinasi dan evaluasi, diantaranya:

- Modul RAP TA 2027 yang akan dijadikan rujukan masih dalam tahapan pengujian, sehingga Pemkab Kaimana masih harus menunggu penyusunan RAP Awal.
- Pemkab Kaimana belum efektif menyusun rancangan RKPD di SIPD sebagai sumber data Musrenbang.
- KMK 146 Tahun 2026 mengamanatkan tambahan alokasi DOK dan DTI 2026 untuk segera dilaksanakan tahun 2026 melalui mekanisme RAP Perubahan, sementara modul RAP Perubahan atas tambahan alokasi DOK dan DTI, belum tersedia.
- Belum tersedia fasilitas tagging subkegiatan DOK dan DTI yang bersumber dari tambahan alokasi

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS – PAPUA BARAT, 2026

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,21**

Baseline (2025): 13,21

Target (2029) : 13,54 – 14,55

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **8,07**

Baseline (2025): 8,07

Target (2029) : 11,13 – 11,15

Sumber Data: RAPPP & BPS, 2026

KEGIATAN STRATEGIS-2

Dokumentasi Kegiatan Strategis #2



Photo: Kunjungan Kerja POKJA Papua Cerdas ke Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Kaimana

Mitra Strategis:

- Inspektorat Daerah
- Bappedalitbang Kaimana
- BPKAD Kaimana

Kaimana, 3 Juni 2026, POKJA Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana. Tujuan koordinasi pembentukan tim Task Force TKD dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DOK Otsus. Fungsi SHEK yang dilaksanakan POKJA Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat yaitu koordinasi pembentukan tim task force TKD. Hasil koordinasi diantaranya:

- Telah terinventarisir unsur kelembagaan yang akan ditugaskan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Task Force Pengelolaan TKD dalam rangka pelaksanaan DOK di Kabupaten Kaimana.
- Draft SK Tim Task Force telah dikonsep bersama, dan akan direview oleh pihak-pihak yang berkewenangan.
- Draft SK Tim Task Force Pengelolaan TKD dalam rangka Otsus Papua, segera akan dilanjutkan ke Bagian Hukum untuk berproses sehingga menjadi kekuatan hukum bagi Tim Task Force dalam melaksanakan tugas nantinya.

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS – PAPUA BARAT, 2026

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,21**

Baseline (2025): 13,21

Target (2029) : 13.54 – 14,55

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **8,07**

Baseline (2025): 8,07

Target (2029) : : 11.13 – 11,15

Sumber Data: RAPPP & BPS, 2026

KEGIATAN STRATEGIS-3

Dokumentasi Kegiatan Strategis #3



Photo: Kunjungan Kerja POKJA Papua Cerdas ke Lokasi Pendirian SMK Negeri 3 Pariwisata Triton Kaimana di Distrik Kaimana

Mitra Strategis:

- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kaimana
- LMA Mairasi Kaimana

Kaimana, 4 Juni 2026, POKJA Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi pendirian SMK Negeri 3 Pariwisata Triton Kaimana. Tujuannya adalah mendengar dan memperoleh masukan atau aspirasi langsung dari masyarakat lokal dan LMA Mairasi sebagai pemilik ulayat atas tanah rencana pendirian bangunan SMK. Fungsi SHEK yang dilaksanakan POKJA Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat yaitu koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan LMA Mairasi berkenaan dengan rencana pembangunan SMK Negeri 3 Pariwisata Triton Kaimana. Hasil koordinasi diantaranya:

- Pemerintah Kabupaten Kaimana telah menyiapkan izin operasional dan izin pendirian sebagai salah satu syarat pengusulan pendirian sekolah baru.
- Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga telah menyelesaikan pengurusan dan penerbitan NPSN pendirian sekolah baru.
- LMA Mairasi telah memberikan persetujuan secara tertulis untuk menghibakan lokasi pembangunan unit sekolah baru di wilayah adat Mairasi.

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS – PAPUA BARAT, 2026

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,21**

Baseline (2025): 13,21

Target (2029) : 13,54 – 14,55

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **8,07**

Baseline (2025): 8,07

Target (2029) : : 11,13 – 11,15

Sumber Data: RAPPP & BPS, 2026

KEGIATAN STRATEGIS-4

Dokumentasi Kegiatan Strategis #4



Photo: Kunjungan Kerja POKJA Papua Cerdas dan Pemerintah Kabupaten Kaimana ke Ketua Komite III DPD RI di Jakarta

Jakarta, 16 Juni 2026, POKJA Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Ketua Komite III DPD RI. Tujuannya adalah fasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kaimana (Wakil Bupati) dan jajaran dengan Ketua Komite III DPD RI (Dr. Filep Wamafma, S.H., M. Hum.) di Jakarta. Fungsi SHEK yang dilaksanakan POKJA Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat yaitu koordinasi dan fasilitasi pertemuan Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan DPD RI, guna memperoleh arahan dan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat (K/L) terkait pembangunan gedung sekolah baru. Hasil koordinasi diantaranya:

- Ketua Komite III DPD RI akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan K/L terkait sesuai dengan kewenangan, guna memperoleh dukungan finansial untuk pembangunan unit sekolah baru (SMK Negeri 3 Pariwisata Triton Kaimana).
- Hasil koordinasi akan dikomunikasikan secepatnya kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana, sehingga sedapat mungkin mempersiapkan langkah-langkah strategis selanjutnya.



Terima Kasih

